



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KOTA BIMA

TAHUN ANGGARAN 2020



Jl. Gajah Mada No.10 Kel Pane Kec. Rasane
Barat Kota Bima - NTB

2021



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah S.W.T . Kami sampaikan karena atas ijin Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2020 selesai disusun. LKIP disusun sebagai langkah dari tatakelola kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah Kota Bima melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk dari pengangkatan Status Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Bima oleh Pemerintah Kota Bima melalui Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kota Bima yang diperkuat dengan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima, dengan melaksanakan 2 (Dua) Kinerja Utama yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Meningkatnya Nilai Investasi, berdasarkan SK Kepala Dpmptsp Nomor : 188.45/046/DPMPPTSP/IX/2020 Tentang Penetapan Hasil Reviuw Indikator Kinerja Utama (Iku) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp Kota Bima.

Segala Upaya dan pengerahan sumber daya telah dilakukan dalam mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi-misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dan LKIP 2020 adalah wujud dari pertanggung jawaban kami tentang semua itu.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya LKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2020 ini, dan tidak lupa pula kami meminta maaf atas berbagai kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk mendukung pencapaian kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Kota Bima, Februari 2021
Plt. Kepala Dinas

Drs. ADISAN
Pembina (IV/a)
Nip.196507292005011004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
3. KONDISI ORGANISASI	2
B. TUGAS POKOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BIMA	3
1. TUGAS	3
2. FUNGSI	3
3. STRUKTUR ORAGANISASI	17
4. DATA PEGAWAI DPMPTSP	18
C. KEWENANGAN DPMPTSP	19
D. PERMASALAHAN UTAMA/ISSUE STRATEGIC	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023	21
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	22
2.3 PERJANJIAN KINERJA	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERAJA	30
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	30
3.1.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019	31
3.1.2 EVALUASI KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	35
3.1.3.EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	36
3.1.4 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	43
3.2 CAPAIAN KINERJA ESELON	46
3.3 AKUNTABILITAS ANGGARA	50
BAB IV PENUTUP	55



DAFTAR TABEL

Gambar 1. Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bima	18
Tabel. 1 data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselonering	19
Tabel. 2 Data Menurut Golongan/Ruang	19
Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran Jangka menengah DPMPTSP	21
Tabel 2.2 Penetapan Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra	22
Table 2.3 Perjanjian Kinerja	24
Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja	30
Tabel 3.2 Rekapitulasi Pencapaian Sasarab Tahun 2019	31
Table 3.1.1 tingkat pencapaian masing-masing indicator kinerja sasaran dari Hasil capaian indicator kinerja	31
Table 3.1.1.2. tingkat pencapaian masing-masing indicator kinerja berdasarkan Program dan kegiatan tahun 2019	32
Tabel.3.1.2 Evaluasi Keselarasan Dokumen Perencanaan & Penganggaran...	36
Tabel. 3.1.3 Pengukuran Kinerja IKM	37
Grafik 3.1.3.1.Realisasi IKM	37
Table 3.1.3.2 rekapitulasi pencapaian indicator kinerja utama untuk IKM	38
Tabel 3.1.3.4. Pengukuran Kinerja Porsentase Nilai Investasi	39
Tabel. 3.1.3.5 Rekapitulasi Nilai Investasi Pelaku usaha dikota bima	40
Grafik 3.1.3.6 Realisasi Nilai Investasi	41
Tabel. 3.1.3.7 Rekapitulasi penerbitan Usaha Perorangan dan Non Perseorangan....	42
Grafik 3.1.3.8 Rekapitulasi Penerbitan Izin Usaha Mikro (IUMK)	43
Tabel. Evaluasi Hasil RKPD tahun 2020 DPMPTSP	44
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Eselon	46
Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja Eselon II	46
Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Eselon III	46
Tabel 3.2.3 Capaian Kinerja Eselon IV	47
Table 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2019	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88); serta Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 312), yang mempunyai Tugas kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan sebagaimana pada visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pada Renstra 2018-2023.

Dalam melaksanakan fungsi kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah menerapkan dan melaksanakan RPJM, RKPD serta Renja sesuai dengan Perubahan Renstra 2014-2018 (Renstra Tahun kedua), termasuk kinerja yang berkaitan dengan SPM yang telah dilaporkan sesuai target BKPM.

Untuk memenuhi rencana kerja yang telah ditetapkan terutama yang berhubungan dengan investasi dan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP terdapat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama lima tahun dan kinerja tahunan. Untuk kinerja kegiatan capaian program harus terjabarkan dalam LKIP sehingga akan dapat diketahui dari target dan capaian kinerja tahun berjalan. Laporan kinerja berisikan rencana, target,

capaian dan realisasi terhadap pengelolaan keuangan perangkat Daerah (PD) sehingga dari capaian tersebut dapat terukur dan terevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, maka setiap akhir tahun anggaran untuk menyampaikan laporan akuntabilitas keuangan kepada pemerintah daerah (Walikota).

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuat laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Permenpan nomor 53 tahun 2014 adalah sebagai Sebagai salah satu pertanggung jawaban Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan serta kebijakan-kebijakan yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh setiap perangkat Daerah (PD).

Adapun tujuan dari laporan kinerja instansi pemerintah ini adalah melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam rangka mengimplementasikan kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian dan kekurangannya untuk dievaluasi. sehingga menjadi dasar bagi peningkatan kegiatan untuk tahun yang akan datang disamping untuk informasi bagi masyarakat yang memerlukan.

3. Kondisi organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota



Bima Nomor 88); serta Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 312), Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan,yang meliputi Bidang Penanaman Modal, Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan, Bidang Pelayanan Perizinan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat beberapa kali perubahan pelimpahan kewenangan dari Keputusan Walikota Bima Nomor 35 tahun 2017 tentang pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan non perizinan yang semula 8 jenis izin usaha menjadi 100 jenis usaha yang ditangani ,kemudian Perubahan Peraturan Walikota Bima nomor 35 tahun 2018 tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan menjadi 99 jenis usaha yang dilayani pada DPMPTSP Kota Bima.

B. TUGAS POKOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BIMA.

Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima sebagai Berikut :

1. TUGAS

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

2. FUNGSI

Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan;
 - c. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara dilingkungan dinas;
 - d. Pengelolaan urusan ASN;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah/negara.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
 - e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
 - f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
 - g. Penyusunan laporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian, dan ;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan keuangan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan keuangan di bidang penanaman modal dan perizinan;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang penanaman modal dan perizinan;
 - e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
 - f. Pengumpulan, pengolahan penyajian data dan statistik di bidang penanaman modal dan perizinan;
 - g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepegawaian;
 - h. Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
 - i. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar; dan

Kepala Bidang Penanaman Modal

1. Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal.



2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan Operasional Penyusunan program kerja dibidang penanaman modal daerah;
- b. Merencanakan Operasional Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penanaman modal daerah;
- c. Memberi petunjuk Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan promosi dan investasi;
- d. Memberi petunjuk Perumusan bidang usaha yang tertutup atau yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
- e. Mengatur Pemetaan investasi daerah terkait dengan SDM dan UMKM serta usaha besar;
- f. Mengatur Perumusan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi;
- g. Mengatur Perumusan usulan dan pemberian insentif diluar fiskal dan non fiskal;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan penanaman modal;
- i. Membagi tugas Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Mengatur Fasilitasi kerja sama dunia usaha dibidang penanaman modal ditingkat kota;
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang penanaman modal; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Potensi dan Promosi

1. Seksi potensi dan promosi melaksanakan tugas membantu kepala bidang penanaman modal dalam penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang potensi dan promosi;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana tugas dan fungsi seksipotensi dan promosi sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Penggalian informasi mengenai potensi peluang investasi;
 - b. Membimbing bawahan dalam Penggalian informasi mengenai potensi peluang investasi;
 - c. Menyusun formasi perkembangan Penggalian informasi mengenai potensi peluang investasi;
 - d. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan promosi investasi, baik melalui media cetak, elektronik dan pameran.
 - e. Mengumpulkan dan mengolah data Pelaksanaan kegiatan promosi investasi, baik melalui media cetak, elektronik dan pameran.
 - f. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan penyuluhan dibidang penanaman modal;
 - g. Mengumpulkan dan mengolah data guna Pelaksanaan penyuluhan dibidang penanaman modal;
 - h. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan promosi investasi;
 - i. Mengevaluasi Pelaksanaan penyuluhan dibidang penanaman modal;
 - j. Mengevaluasi kajian potensi dan pemasaran penanaman modal;
 - k. Melaporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.



Kepala Seksi Kerjasama

1. Seksi kerja sama melaksanakan tugas membantu kepala bidang penanaman modal melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kerja sama.
2. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana tugas dan fungsi seksi kerja sama sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Perumusan kebijakan teknis kerja sama penanaman modal daerah;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka Pemberian dorongan dan kemudahan bagi pengembangan penanaman modal;
 - c. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal antara daerah, regional dan internasional;
 - d. Mengumpulkan dan mengolah data guna Pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal antara daerah, regional dan internasional;
 - e. Menyusun formasi perkembangan Pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal antara daerah, regional dan internasional;
 - f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama penanaman modal daerah;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang kerja sama; dan
 - h. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan

1. Melaksanakan pelayanan informasi, pengaduan, dan inovasi pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :



- a. Merencanakan operasional Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta inovasi pelayanan;
- b. Membagi tugas Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta inovasi pelayanan;
- c. Memberi petunjuk Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta inovasi pelayanan;
- d. Merencanakan operasional Pelaksanaan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- e. Memberi petunjuk Pelaksanaan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- f. Merencanakan operasional Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap mutu layanan perizinan dan non perizinan;
- g. Menyusun Perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;

- h. Mengevaluasi hasil Perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasikan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;
- i. Merencanakan operasional Penyusunan dan pengembangan kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- j. Melakukan Penyusunan dan pengembangan kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- k. Mengevaluasi pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Layanan Informasi dan pengaduan

- 1. Membantu Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan dalam melaksanakan pelayanan informasi di bidang Layanan Informasi dan Pengaduan.
- 2. Untuk meyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;



- b. Menyusun formasi perkembangan Penyelenggaraan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Mengevaluasi hasil Penyiapan bahan kegiatan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Memeriksa hasil Pendokumentasian dan pengarsipan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Membagi tugas Penyelenggaraan layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- f. Membimbing bawahan dalam Pelaksanaan analisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. Menyusun formasi perkembangan Perumusan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Merencanakan kegiatan Pengkoordinasian penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. Melaporkan hasil kegiatan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- j. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

- k. Membagi tugas dalam Pelaksanaan monitoring dan evaluasi data penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala seksi Kebijakan dan Inovasi Pelayanan

1. Membantu Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan dalam bidang Kebijakan dan Inovasi Pelayanan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud sebagai mana dimaksud sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan Penyusunan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. Menyusun formasi perkembangan Pelaksanaan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. Menyusun formasi perkembangan Penyiapan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan kepada bawahan;
 - e. Mengevaluasi hasil kegiatan Pelaksanaan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan serta model atau tata cara penyuluhan terhadap masyarakat;

- f. Mengumpulkan dan mengolah data bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada bawahan;
- g. Membagi tugas Penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal kepada bawahan;
- h. Membimbing bawahan dalam Pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman modal;
- i. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

1. Bidang pelayanan perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan perizinan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
 - a. Merencanakan operasional Penyusunan program kerja dibidang pelayanan perizinan;
 - b. Merencanakan operasional Penyusunan petunjuk teknis pelayanan perizinan;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan;
 - d. Merencanakan operasional Perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
 - e. Memberi petunjuk pelaksanaan PTSP berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota;
 - f. Memberi petunjuk usulan persetujuan fasilitasi fiskal yang menjadi kewenanagn kota;
 - g. Mengatur pedoman dan tata cara pengembangan sistem;

- h. Menyelia permohonan izin dan non izin;
- i. Memberi petunjuk Pelayanan umum kepada dunia usaha mengenai perizinan yang diperlukan;
- j. Mengatur Sosialisasi kebijakan terkait dengan pelayanan perizinan berkoordinasi dengan sekretariat;
- k. Memberi petunjuk Pengembangan pelayanan perizinan melalui sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE); dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha

- 1. Seksi pelayanan perizinan usaha melaksanakan tugas membantu kepala Bidang pelayanan perizinan dalam melaksanakan pelayanan perizinan usaha;
- 2. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan usaha;
 - b. Membimbing bawahan dalam melakukan identifikasi jenis perizinan usaha;
 - c. Membagi tugas Pengelolaan data perizinan usaha kepada bawahan;
 - d. Menyelia pelaksanaan Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan – persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan usaha;
 - e. Memeriksa hasil Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan – persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan usaha;
 - f. Mengumpulkan dan mengolah data Pelayanan proses penertiban dokumen perizinan usaha;

- g. Merencanakan kegiatan Penelitian lapangan dan teknis perizinan bidang usaha dengan tim teknis;
- h. Mengevaluasi hasil pelaksanaan pelayanan perizinan usaha;
- i. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Merencanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan perizinan usaha;
- k. Membimbing bawahan dalam Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dibidang perizinan usaha; dan
- l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala seksi pelayanan perizinan Non usaha

- 1. Seksi pelayanan perizinan Non usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas membantu kepala Bidang perizinan dalam melaksanakan pelayanan perizinan non usaha.
- 2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sebaga berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan non usaha;
 - b. Membimbing bawahan dalam melakukan Identifikasi jenis pelayanan perizinan non usaha;
 - c. Membagi tugas Pengelolaan data dan penetapan retribusi perizinan non usaha;
 - d. Membimbing bawahan dalam Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan-persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan non usaha;
 - e. Memeriksa hasil Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan-persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan non usaha;

- f. Mengumpulkan dan mengolah data Pelayanan proses penertiban dokumen perizinan non usaha;
- g. Memeriksa hasil Penelitian lapangan dan teknis bidang perizinan non usaha;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha;
- i. Merencanakan Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Membimbing bawahan dalam Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dibidang perizinan non usaha;
- k. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan perizinan non usaha; dan
- l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

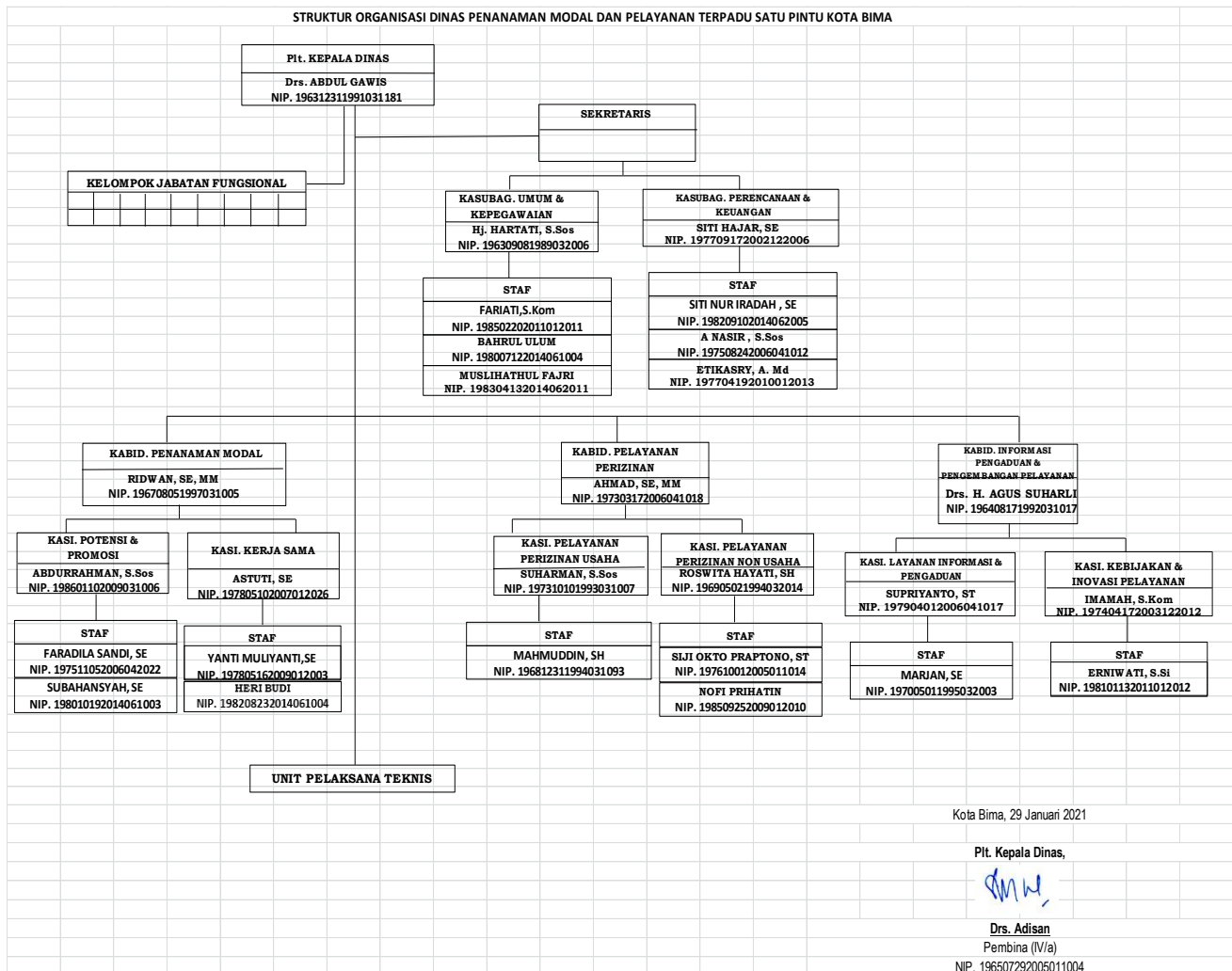
3. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Bima sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Penanaman modal, terdiri dari :
 - a. Seksi Potensi dan Promosi;
 - b. Seksi Kerja sama.
4. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan non Usaha.
5. Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan, terdiri dari :
 - a. Seksi layanan Informasi dan Pengaduan;

- b. Seksi Kebijakan dan Inovasi Pelayanan
6. Unit Pelaksana Teknis.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1. Struktur Organisasi DPMPTSP KOTA BIMA.



4. Data Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

Jumlah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Bulan Desember 2020 adalah sebanyak 27 Orang Pegawai dan 10 Orang tenaga Kontrak.

Pegawai berdasarkan kedudukan dalam organisasi

1. Menurut Jabatan/Eselon

Tabel 1. Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering:

No	Eselon	Jenjang Pendidikan				Jumlah Pegawai
		SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Eselon II	0	0	1	0	1
2	Eselon III	0	0	21	0	21
3	Eselon IV	0	0	3	0	3
4	Non Eselon	3	0	0	0	3
	Jumlah					27

2. Menurut Golongan/Ruang

Tabel.2 Data Menurut Golongan/Ruang

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	
1	S2	0	0	2	0	2
2	S1	0	0	21	0	21
3	D3/D2/D1	0	0	1	0	1
4	SMA	0	3	0	0	3
5	SMP	0	0	0	0	0
6	SD	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	3	24	0	27

C. KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BIMA

Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi promosi dan penggalian potensi, pengendalian, perizinan dan melakukan kajian untuk regulasi-regulasi yang berkaitan dengan paket insentif dan kemudahan berusaha sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

D. PERMASALAHAN UTAMA/ISSUE STRATEGIC

Beberapa permasalahan utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat digambarkan sebagai berikut :



1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA), Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kota Bima.
2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA), Kurang optimalnya pengawasan kegiatan penanaman modal karena belum semua investor membuat laporan LKPM Melalui Kepala DPMPTSP dan LKPM secara online.
3. Rasio daya serap tenaga kerja yang ada dikota Bima
4. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah).
5. Belum semua database penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD terkait
6. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan sistem pelayanan perizinan secara online.
7. Masa berlaku izin Usaha berlaku seumur hidup yang menyebabkan kurangnya Realisasi jenis izin yang terbit.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang hendak dilakukan. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud di atas, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, dengan VISI Pemerintah Kota Bima : “ Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri. Dengan VISI Dpmptsp Kota Bima “ Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi yang Unggul. Berikut keterkaitan antara RPJMD dan Indikator kinerja pemerintah dengan Indikator Dpmptsp Kota Bima, dengan tabel berikut :

*Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Bima*

Tabel. 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

No	Tujuan (sasaran strategis RPJMD)	Indikator Utama (Sasaran Strategis/ Tujuan)	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2018	Target kinerja tujuan/sasaran tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	76,86	78,86	80,86	84,86	88,86	92,86
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA	10%	10%	10%	10%	10%	10%

sumber : RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023



2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja daerah memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP . Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2018-2023.

Tabel 2.2. Penetapan Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra DPMPTSP 2018-2023

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	URAIAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$	Laporan hasil survey kepuasan masyarakat	Kepala Dinas
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Porsentase Peningkatan Nilai Investasi	$= \frac{\text{Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA tahun (n) - Jumlah Realisasi Nilai Investasi tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Realisasi Investasi tahun n-1}} \times 100\%$	Laporan realisasi Penanaman modal	Kepala Dinas



2.3 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabilitas dan berorientasi kepada hasil, perlu disusun Penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai tahun 2020.

Penetapan Kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala PD dengan Kepala Daerah dan merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi dalam akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2020 Sebagai wujud penilaian kinerja antara Kepala PD dengan Kepala Daerah, Penetapan Kinerja Merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja tahunan yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan seluruh aparat DPMPTSP karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang berdaya guna bagi kepentingan masyarakat.

Dengan Perencanaan Kinerja tersebut diharapkan DPMPTSP fokus dan terarah dalam mengelola program/kegiatan. Penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2020 mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2023. Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah (RKPD) tahun 2018, dokumen rencana strategis tahun 2018-2023, dokumen Rencana kerja (RENJA) DPMPTSP tahun 2020 dan DPA DPMPTSP Tahun 2020. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan sumber daya yang ada.



1. Kepala Dinas

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	80,86
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Porsentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA	10 %

2. Sekretaris

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Meningkatkan Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1. Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	100 %
	2. Cakupan ketersediaan Sarana dan prasarana perkantoran	100 %
	3. Cakupan Pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin	100 %
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta akuntabilitas keuangan	1. Cakupan temuan internal dan eksternal -Porsentase ketepatan penempatan antara program, kegiatan dan anggaran, Nilai LKIP oleh Inspektorat Kota Bima	100%

a. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Terlaksananya pelayanan administrasi jasa perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kepegawaian	1. Jumlah Surat menyurat perkantoran yang diterima dan terdistribusi	550 lembar
	2. Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	5 Jasa pelayanan
	3. Jumlah ketersediaan peralatan perkantoran	22 Bh/Unit
	4. Jumlah ketersediaan perlengkapan perkantoran	2 Bh/Unit
	5. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	30 Bh/Unit
	6. Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	9 Dok
	7. Ketepatan waktu penyelesaian rekonsiliasi BMD	Tepat Waktu
	8. Jumlah dokumen kepegawaian yang tersedia	12 dok
	9. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis PTSP	6 Orang
	10. Jumlah tamu yang terlayani dengan makan minum	250 Orang

b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Terlaksananya peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta akuntabilitas keuangan	1. Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	5 Dok
	2. Jumlah Laporan Perencanaan	3 Laporan
	3. Jumlah Laporan Keuangan	3 laporan
	4. Jumlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Laporan Penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah	2 Laporan
	5. Jumlah dokumen kebijakan internal yang diterbitkan	4 Dok
	6. Posentase keselarasan program, kegiatan dan anggaran internal	75 %
	7. Porsentase program, kegiatan dan anggaran yang terakumodir sesuai dengan kebutuhan DMPTSP pertahun	85%
	8. Presentase kepuasan Pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan	95 %

3. Kepala Bidang penanaman modal

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Meningkatnya investasi Menengah ke atas PMDN/PMA yang memiliki izin	Porsentase peningkatan Investasi Menengah ke atas yang berizin	100%
2. Meningkatnya Realisasi Usaha yang berizin	Porsentase usaha berizin dengan volume usaha meningkat	100%

a. Kasi Potensi dan promosi

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Terlaksananya dokumen perda dan perwali	Dokumen rancangan perda dan perwali	2 Dok
2. Terlaksananya Penyebarluasan informasi potensi dan peluang usaha	Jumlah publikasi informasi Investasi yang dilakukan	4 Kali

b. Kasi Kerjasama

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal	Jumlah Dokumen LKPM dan berita Acara (Buku panduan LKPM)	50 Perusahaan
2. terlaksananya kerjasama investasi	Jumlah kerjasama investasi yang disepakati	3 MOU

4. kabid. Pelayanan Perizinan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Meningkatnya Efektifitas pelayanan perizinan	Rata-rata Lama Proses penyelesaian Pelayanan perizinan	1 Hari

a. Kasi Perijinan Non Usaha

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. terlaksananya jumlah verifikasi lapangan	Jumlah permohonan izin yang diverifikasi	1500 Izin Usaha/Non usaha

b. Kasi Perijinan Usaha

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Tersedianya Standar pelayanan terhadap setiap izin usaha/Non usaha yang diterbitkan	Jumlah Standar Pelayanan terhadap jenis izin yang diterbitkan	97 Dokumen
2. Terlaksananya pemberian pelayanan perizinan usaha / non usaha	Jumlah Izin usaha dan non usaha yang diterbitkan	2500 izin usaha/non usaha

5. Kabid. Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan	Rata-rata Lama Proses Pemenuhan Komitmen terkait Izin usaha dan Izin Operasional/Komersil PBTSE	3 Hari

a. Kasi Informasi dan Pengaduan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Terpenuhinya Dokumen Pedoman dan Tata cara pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin usaha dan Izin Operasional/Komersil PBTE	Pedoman Komitmen yang tersusun	24 pedoman pemenuhan komitmen
Terpenuhi tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat mengenai pelayanan perizinan	jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %
Terlaksananya survey IKM	Jumlah laporan IKM	2 Dokumen

b. Kasi Kebijakan dan inovasi Pelayanan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Terlaksananya Sosialisasi Perizinan yang terintegrasi Secara Elektronik (Online)	Jumlah Izin Yang terintegrasi secara Elektronik (Online)	97 Jenis izin usaha dari 13 sektor perijinan
2. tersedianya Dokumen Realisasi Investasi tiap tahun	Dokumen Realisasi Investasi	1 Dokumen

2.4 Anggaran Kegiatan Tahun 2020

Berikut ini merupakan rekapitulasi anggaran berdasarkan Program kegiatan yang ada di Dinas Penanaman modal dan PTSP.

Program/Kegiatan	Anggaran
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	426.787.800,00
Penyediaan jasa surat menyurat	60.900.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	50.640.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.500.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan	56.464.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor	21.600.000,00
Penyediaan alat tulis kantor	20.723.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.830.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.961.500,00



Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	29.880.000,00
Penyediaan makanan dan minuman	3.608.300,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	136.681.000,00
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	219.389.800,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	24.305.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor	8.190.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.234.800,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.660.000,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	150.000.000,00
c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	125.623.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan semesteran	14.272.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan Prognosis	7.748.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	13.908.000,00
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA-DPA/PRKA-DPPA	52.526.500,00
Penyusunan LAKIP dan LPPD	37.168.500,00
d. Program Peningkatan Realisasi dan Kerjasama Investasi	93.652.300,00
Pengendalian Palaksanaan Penanaman Modal	59.982.650,00
Peningkatan Kerjasama Investasi	33.669.650,00
e. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Promosi	107.237.700,00
Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	65.317.700,00
Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	41.920.000,00
f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan	198.092.500,00
Penyusunan Pedoman dan Tatacara Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Operasional / komersil PBTSE	30.293.500,00



Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	43.366.500,00
Survey Kepuasan Masyarakat	61.740.000,00
Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	31.972.500,00
Penyusunan Dokumen Realisasi Investasi	30.720.000,00
g. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	195.880.000,00
Peningkatan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	16.125.000,00
Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu	142.275.000,00
Melakukan Verifikasi Lapangan	37.480.000,00
Total	1.366.663.100,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan pada pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara priodik.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Bahwa pada Tahun 2020 jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama dengan rata-rata pencapaian diatas 100%, dengan nilai rata-rata capaian dari ketiga indikator tersebut yakni 215% , dimana semua sasaran masuk kategori Sangat Tinggi (Berhasil) sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2 .

Tabel 3. 2. Rekapitulasi Pencapaian Sasaran Tahun 2019

No	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil Program)	Indikator Kinerja	Interval Nilai realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91% ≤100%	Sangat Tinggi	112%
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Porsentase Peningkatan Nilai Investasi	91% ≤100%	Sangat Tinggi	318%

3.1.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020

Bahwa pada Tahun 2020 jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 2 sasaran dimana semua sasaran masuk kategori berhasil sebagaimana tersaji pada Tabel 3.3.

Tabel 3.1.1. Tingkat Pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja Tahun 2020

No	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil Program)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,86	90,32	112%
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Porsentase Peningkatan Nilai Investasi	10 %	32%	318%



Dari tabel diatas dapat dijelaskan lebih rinci terkait pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari capaian indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan tahun 2020, berikut disajikan dalam tabel :

Tabel. 3.1.1.2. Tingkat Pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Program/kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	80,86	90,32	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Rata-rata Lama Proses penyelesaian Pelayanan perizinan	1 Hari	1 Hari	100%
					Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu	Jumlah Izin usaha dan non usaha yang diterbitkan PTSP	2500 lembar izin	2218 Lembar Izin	89 %
					Peningkatan standar pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah Standar Pelayanan terhadap jenis izin yang diterbitkan	97 Dokumen	97 Dokumen	100%
					Melakukan Verifikasi Lapangan (Kegiatan Survey)	Jumlah permohonan izin yang diverifikasi	1500 Jenis izin Usaha	835 (izin usaha dan non usaha)	56 %



					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pengembangan pelayanan	Rata-rata Lama Proses Pemenuhan Komitmen terkait Izin usaha dan Izin Operasional/Komersil PBTSE	3 Hari	3 Hari	100%
					Penyusunan Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Operasional/Komersil PBTSE	Pedoman Komitmen yang tersusun	24 pedoman pemenuhan komitmen	24 Pedoman Pemenuhan Komitmen	100%
					Pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat	jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
					Survey kepuasan masyarakat	Jumlah laporan IKM	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
					Sosialisasi pelayanan terpadu satu pintu	Dokumen laporan realisasi perizinan	97 Jenis izin dari 13 Sektor Perizinan	97 Jenis izin dari 13 Sektor Perizinan	100%
					Penyusunan Dokumen Realisasi Investasi	Dokumen Realisasi Investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



2	Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase peningkatan nilai investasi	10 %	32%	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Promosi	Porsentase Peningkatan Investasi Menengah ke atas yang berizin	100 %	100%	100%
					Penyusunan Regulasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	Dokumen rancangan perda dan perwali	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
					Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah publikasi informasi investasi yang dilakukan	4 Kali	4 Kali	100%
					Program Peningkatan Realisasi dan Kerjasama Investasi	Porsentase usaha berizin dengan volume usaha meningkat	100%	110%	110%
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal	Jumlah Dokumen LKPM dan berita Acara, Buku Panduan / saku LKPM	50 Dokumen Perusahaan	55 Perusahaan	110%	
				Peningkatan Kerjasama Investasi	Jumlah kerjasama investasi yang disepakati	3 MOU	2 MOU : Yakni BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan	67%	



Dari Tingkat Pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2020, ada beberapa program/ kegiatan yang tidak mencapai target 100% yakni pada kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu dengan target Jumlah Izin usaha dan non usaha sebanyak 2500 lembar izin, tetapi cuman mencapai realisasi terbit izin sebanyak 2218 lembar izin, atau tercapai 89%, hal ini dikarenakan terjadi Pandemi Covid 2019 yang menyebabkan ekonomi melemah sehingga mempengaruhi menurunnya pendapatan masyarakat/ pelaku usaha.
2. Melakukan Verifikasi Lapangan (Kegiatan Survey) Jumlah permohonan izin yang diverifikasi dengan target sebanyak 1500 Jenis izin Usaha tetapi realisasi sebanyak 835 (izin usaha dan non usaha) atau dengan capaian 56 %, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid 2019 yang menyebabkan sedikitnya pelaku usaha yang datang mengurus izin usaha ke PTSP karena harus menjaga jarak agar tidak tertular dengan Virus Corona.
3. Peningkatan Kerjasama Investasi Jumlah kerjasama investasi yang disepakati dengan target 3 MOU tetapi yang terealisasi sebanyak 2 MOU : Yakni BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, dengan capaian sebesar 67%, hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID 2019 , yang harus mengutamakan protokol kesehatan agar menjaga jarak, menyebabkan kurangnya koordinasi PTSP dengan OPD terkait kesepakatan kerjasama Investasi.

3.1.2 EVALUASI KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Adapun data pendukung capaian kinerja pada indikator persentase perencanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun 2020 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.



Tabel. 3.12. Evaluasi Keselaraan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

No	Program/Kegiatan	Prognas 2020	ProgProv 2020	RPJMD 2023	RKPD 2020	KUA/PPAS 2020	RENSTRA 2020-2023	Renja 2020	RKT 2020	DPA/DPPA 2020	PK/Reviu 2020
URUSAN BERSAMA											
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Program peningkatan disiplin aparatur			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
URUSAN PENANAMAN MODAL											
6.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
URUSAN PERIZINAN & INFORMASI PENGADUAN											
8.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Total	2	2	8	8	8	8	8	8	8	8

3.1.3 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang dicerminkan dalam Capaian Indicator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

a. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tolok ukur capaian kinerja sasaran “Skor Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) ” dengan indikator sasaran :

Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$$

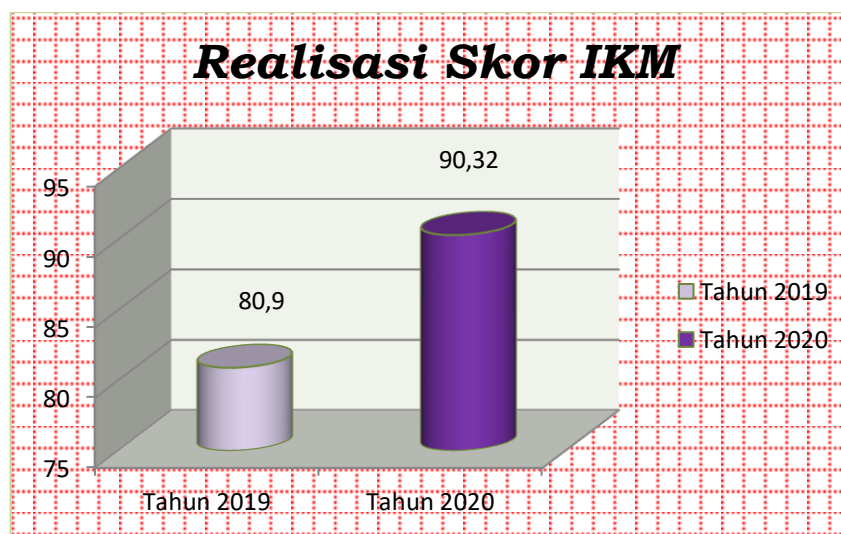
Tabel. 3.1.3 Pengukuran Kinerja IKM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Porsentase	Target	Realisasi	Porsentase
1	2	3	4	5	$6 = 5/4 \times 100$	7	8	$9 = 8/7 \times 100$
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	IKM (Indeks Kepuasan Pelayanan)	78,86	80,90	102%	80,86	90,32	112%

Capaian kinerja IKM ditahun 2020 ditargetkan dengan Skor 80,86 dan terealisasi dengan Skor 90,32 atau sebesar 112%. Jika dilihat dari data tersebut capain kinerja pada tahun 2020 ternilai sangat Tinggi karena mencapai angka diatas 100%

Jika dilihat dari capaian tahun 2019, IKM telah mencapai 102 % atau dengan Skor IKM dengan Realisasi 80,90 maka ditahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 112% mengalami kenaikan 10%.

3.1.3.1 Dapat digambarkan dengan Grafik Realisasi IKM sebagai berikut :





Untuk mengetahui skala pencapaian Nilai IKM, berikut ditampilkan skala Nilai persepsi, Interval IKM, Intervasi Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan pada tabel. 3.1.3.2 berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM (NI)	Nilai Interval Konversi IKM (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Jika dilihat dengan Pencapaian IKM Dpmptsp tahun 2020 bahwa “ SANGAT BAIK ”
Yakni dengan Skor 90,32, atau dapat disajikan dengan tabel berikut ini.

Tabel 3.1.2.3. Rekapitulasi pencapaian Indikator Utama Untuk IKM

No	Nilai Interval IKM (NI)	Nilai Interval Konversi IKM (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	3,82	90,32	A	SANGAT BAIK

Realisasi tersebut dicapai melalui 1 program dan 8 kegiatan antara lain :

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dengan realisasi rata-rata Lama Proses penyelesaian Pelayanan perizinan 1 Hari, terdiri dari :
 - a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu terealisasi sebanyak 2218 izin usaha/non usaha
 - b. Peningkatan standar pelayanan perizinan dan non perizinan Sebanyak 97 Dokumen Standar Pelayan Perizinan.
 - c. Melakukan Verifikasi Lapangan (Kegiatan Survey) dengan realisasi dokumen yang diverifikasi sebanyak 835 izin usaha/non usaha
 - d. Penyusunan Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Operasional/Komersil PBTSE



sebanyak 24 Dokumen Pemenuhan Komitmen guna mengefektifkan izin usaha yang diinput oleh pelaku usaha.

- e. Pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terealisasi dengan 100% tindak lanjut terkait permasalahan pengaduan.
- f. Survey kepuasan Masyarakat terealisasi sebanyak 2 dokumen pertahun dengan capaian Skor IKM 90,32 (Sangat Baik)
- g. Sosialisasi pelayanan terpadu satu pintu guna mendukung 97 Jenis Pelayanan perizinan yang diterapkan online sesuai dengan PP 24 TAHUN 2018 tentang pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik
- h. Penyusunan Dokumen Realisasi Investasi terealisasi sebanyak 1 Dokumen selama setahun

b. Porsentase peningkatan nilai investasi PMDN/PMA

Tolok ukur capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Nilai Investasi “dengan indikator sasaran : Porsentase Peningkatan nilai Investasi :

$$= \frac{\text{Jumlah Realisasi Inves PMDN/PMA tahun N} - \text{Jumlah Realisasi Nilai Inv tahun N-1} \times 100\%}{\text{Jumlah Realisasi Invest tahun N-1}}$$

Tabel. 3.1.3.4 Pengukuran Kinerja Porsentase Nilai Investasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Porsentase	Target	Realisasi	Porsentase
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9=8/7*100
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Porsentase Peningkatan nilai Investasi	10 %	25 %	254%	10 %	32 %	318%



Capaian Porsentase Peningkatan Nilai Investasi ditahun 2020 ditargetkan dengan kenaikan 10% ditiap tahunnya dan terealisasi dengan kenaikan 32% ditahun 2020 atau sebesar 318%. Jika dilihat dari data tersebut capain kinerja pada tahun 2020 ternilai sangat Tinggi karena mencapai angka diatas 100%

BERIKUT DATA NILAI INVESTASI TAHUN 2018, 2019 DAN TAHUN 2020 BERDASARKAN NILAI INVESTASI PELAKU USAHA YANG ADA DIKOTA BIMA

Tabel. 3.1.3.5. Rekapitulasi nilai Investasi Pelaku usaha dikota Bima

No	Jumlah Nilai Investasi tiap Bulan nya	Tahun 2018 Dalam (Rp)	Tahun 2019 Dalm (Rp)	Tahun 2020 Dalam (Rp)
1	Januari	1.324.200.000	5.634.000.000	14.187.000.000
2	Februari	6.703.000.000	25.363.000.000	12.230.000.000
3	Maret	7.972.500.000	11.786.000.000	18.707.000.000
4	April	6.685.000.000	15.515.000.000	12.322.770.806
5	Mei	8.480.000.000	12.214.000.000	5.250.000.000
6	Juni	3.503.000.000	32.801.891.000	40.405.000.001
7	Juli	7.852.000.000	6.670.000.000	117.034.000.000
8	Agustus	7.705.000.000	16.790.000.000	10.980.000.000
9	September	4.709.000.000	24.202.093.278	8.940.000.000
10	Oktober	41.702.500.000	26.925.000.000	13.141.000.000
11	November	63.410.397.742	19.025.500.000	34.382.000.000
12	Desember	16.841.800.000	24.960.093.278	4.835.500.000
	Jumlah Total Investasi	176.888.397.742	221.886.577.556	292.414.270.807

Sumber data laporan perizinan DPMP TSP

3.1.3.6. Berikut disajikan Grafik Realisasi Nilai investasi :



Realisasi tersebut dicapai melalui 2 program dan 4 kegiatan antara lain :

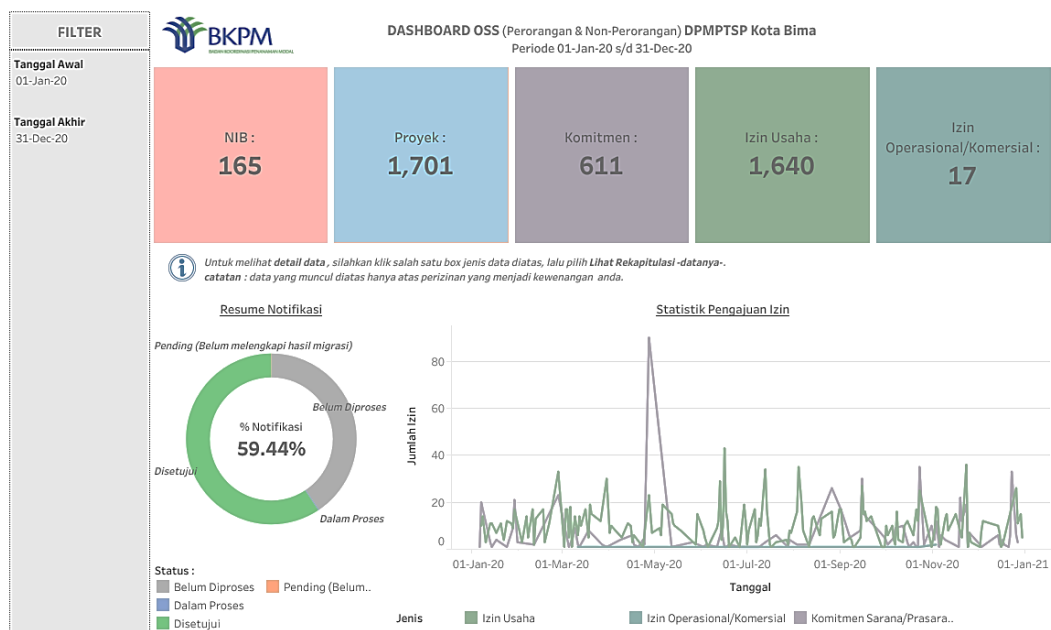
1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Promosi dengan realisasi 100 % dengan didukung oleh kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Regulasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, dengan realisasi sebanyak 2 Dokumen Yakni Perda dan Perwali tahun 2020
 - b. Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah dengan realisasi sebanyak 4kali jumlah informasi dan publikasi yang dilakukan, baik melalui media sosial, informasi pamflet dan sosialisai terhadap masyarakat/pelaku usaha.
2. Program Peningkatan Realisasi dan Kerjasama Investasi dengan teralisasi 110% dengan didukung oleh kegiatan sebagai berikut :



- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal terhadap perusahaan terealisasi sebanyak 55 perusahaan yang berskala usaha menengah yakni dengan modal usaha diaatas 500Juta Rupiah, yang memiliki kewajiban melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM (Laporan kegiatan Penanaman modal) yang diawasi langsung Oleh BKPM.
- b. Peningkatan Kerjasama Investasi, dengan realisasi sebanyak 2MOU yakni BPJS Kesehatan dan BPJS ketennagakerjaan untuk menjamin keselamatan para pekerja dan pelaku usaha yang berinvestasi dikota bima.

Indikator Kinerja Meningkatnya Nilai investasi selalu berbarengan dengan jumlah investor yang melaksanakan kegiatan usaha tersebut, berbagai macam jenis usaha yang telah terangkum dalam database aplikasi OSS, beserta lokasi usaha tersebut , lebih jelasnya akan ditampilkan dalam gambar dibawah ini :

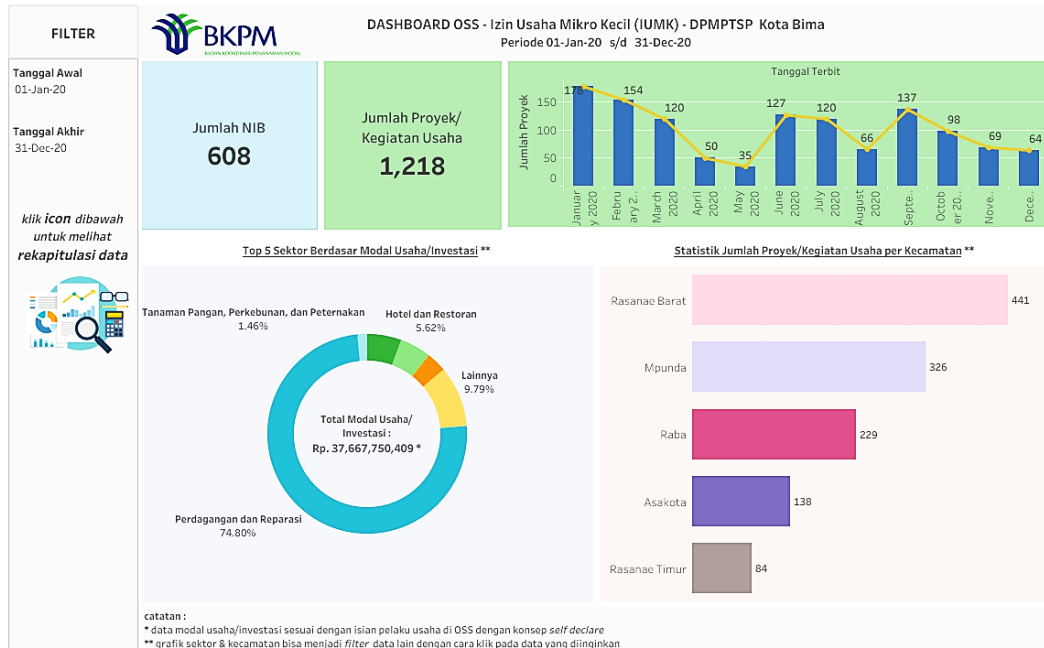
Grafik 3.1.3.7. Rekapitulasi Penerbitan Usaha Perseorangan dan Non Perseorangan



Sumber : nswi.bkpm.go.id



Grafik : 3.1.3.8 Rekapitulasi Penerbitan Izin Usaha untuk Usaha Mikro (IUMK)



Sumber : nswi.bkpm.go.id

3.1.4 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Evaluasi kinerja dilakukan guna membandingkan keberhasilan dari setiap indikator kinerja terhadap sumber daya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator-indikator tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis diperoleh sejumlah indikator yang realisasinya lebih dari atau sama dengan 100%, sehingga dapat diperhitungkan bahwa Capaian Kinerja dikatakan efisien apabila realisasi program lebih kecil dibanding realisasi kinerja.

Untuk mencapai target tiga indikator yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mengalokasikan belanja langsung tahun 2020 sebesar Rp 1.366.663.100,00. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 1.344.654.210,00 atau 98,39 %. Dengan tingkat capaian rata-rata indikator Sasaran Strategis Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima sebesar 215% hal tersebut menunjukkan bahwa



Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima telah melakukan capaian kinerja secara efisien Sangat Tinggi (berhasil) dengan capaian diatas 100%.

Adapun perhitungan efisiensi anggaran disajikan seperti pada Tabel berikut:

:

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020
Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RKPD TAHUN 2020	REALISASI RKPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Urusan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
2.12	Bidang Penanaman Modal						
1.	2.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	100,00	83,00	83,00	T
	2.12.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat perkantoran yang diterima dan terdistribusi	310,00	327,00	105,48	ST
	2.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	persentase pemanfaatann jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100,00	176,00	176,00	ST
	2.12.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Efektivitas kerja pegawai DPMP TSP semakin tinggi, sehingga diperlukan kendaraan Dinas Operasional harus prima	1,00	1,00	100,00	ST
	2.12.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase pembayaran honorarium bendahara	100,00	100,00	100,00	ST
	2.12.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase meningkatnya pemenuhan pelayanan adminstrasi dan jasa Perkantoran	100,00	58,00	58,00	R
	2.12.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	persentase pemehuan pelayanan adminstrasi dan jasa Perkantoran	100,00	100,00	100,00	ST
	2.12.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	persentase pemehuan pelayanan adminstrasi dan jasa Perkantoran	100,00	100,00	100,00	ST
	2.12.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	persentase pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,00	200,00	200,00	ST
	2.12.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	persentase bahan bacaan dan peraturan perubdng - undangan	100,00	100,00	100,00	ST
	2.12.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	persentase makanan dan minuman tamu yang dilayani	100,00	100,00	100,00	ST
	2.12.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Porsentase rapat-rapat koordinasi antar daerah yang telah dilakukan	100,00	100,00	100,00	ST
2.	2.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Porsentase Program peningkatan sarana dan prasaranara Aparatur	100,00	36,00	36,00	SR

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RKPD TAHUN 2020	REALISASI RKPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.12.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	porsentase Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100,00	99,00	99,00	ST
	2.12.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Porsentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100,00	85,03	85,03	T
	2.12.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	porsentase ruangan gedung yang terpelihara	100,00	100,00	100,00	ST
	2.12.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Porsentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100,00	100,00	100,00	ST
	2.12.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Porsentase pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	100,00	100,00	100,00	ST
	2.12.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	porsentase pemeliharaan peralatan gedung kantor	100,00	100,00	100,00	ST
	2.12.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Porsentase Rehabilitasi sedang/berat gedung yang dikerjakan	100,00	97,00	97,00	ST
3.	2.12.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Porsentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan	100,00	87,00	87,00	T
	2.12.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	2,00	2,00	100,00	ST
	2.12.06.03	Penyusunan pelaporan semesteran dan prognosis	jumlah pelaporan keuangan semesteran dan prognosis	2,00	2,00	100,00	ST
	2.12.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	1,00	1,00	100,00	ST
	2.12.06.05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA-DPA/PRKA-DPPA	Jumlah Laporan Rencana Kerja Tahunan	4,00	6,00	150,00	ST
	2.12.06.06	Penyusunan LAKIP dan LPPD	Jumlah laporan Kinerja LKIP dan LPPD	2,00	2,00	100,00	ST
4.	2.12.15	Program Peningkatan Realisasi dan Kerjasama Investasi	persentase perusahaan yang telah menerapkan peraturan penanaman modal	10,00	53,00	530,00	ST
	2.12.15.08	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen LKPM dan berita Acara	50,00	55,00	110,00	ST
	2.12.15.12	Peningkatan Kerjasama Investasi	Jumlah kerjasama investasi yang disepakati	3,00	100,00	3.333,33	ST
5.	2.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Promosi	Jumlah calon investor yang mengajukan izin investasi	5,00	3,00	60,00	R
	2.12.16.04	Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen rancangan perda dan perwali	2,00	2,00	100,00	ST
	2.12.16.05	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Buku panduan/Saku LKPM Online	1,00	0,00	0,00	SR
6.	2.12.17	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan	Rata-rata Lama Proses Pemenuhan Komitmen terkait Izin usaha dan Izin Operasional/Komersil PBTSE	3,00	65,00	2.166,67	ST
	2.12.17.06	Penyusunan Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Operasional / Komersil PBTSE	Pedoman Komitmen yang tersusun	24,00	36,00	150,00	ST
	2.12.17.07	Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100,00	100,00	100,00	ST
	2.12.17.08	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan IKM	4,00	4,00	100,00	ST
	2.12.17.09	Sosialisasi Pelayanan Perijinan	Jumlah Izin Yang terintegrasi	97,00	97,00	100,00	ST

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPKD TAHUN 2020	REALISASI RPKD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terpadu Satu Pintu	secara Elektronik (Online)				
	2.12.17.10	Penyusunan Dokumen Realisasi Investasi	Dokumen Realisasi Investasi	1,00	1,00	100,00	ST
7.	2.12.51	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Rata-rata Lama Proses penyelesaian Pelayanan perizinan	1,00	63,00	6.300,00	ST
	2.12.51.01	Peningkatan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Standar Pelayanan terhadap jenis izin yang diterbitkan	97,00	97,00	100,00	ST
	2.12.51.04	Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu	Jumlah Izin usaha dan non usaha yang diterbitkan	2.500,00	2.217,00	88,68	T
	2.12.51.13	Melakukan Verifikasi Lapangan	Jumlah permohonan izin yang diverifikasi	1.500,00	1.500,00	100,00	ST

Ket : ST = Sangat Tinggi
T = Tinggi
S = Sedang
R = Rendah

3.2 CAPAIAN KINERJA ESELON

Dapat disajikan dalam tabel Capaian Kinerja Eselon II, III dan IV :

3.2.1. Capaian Kinerja Eselon II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)			Ket
					2018	2019	2020	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	I. Rata-rata IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	80,86	90,32	94,59 %	102 %	112 %	Berhasil
2.	Meningkatnya Nilai Investasi	II. Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA	10 %	32%	236,3 %	254 %	318 %	Berhasil
		III. Porsentase Peningkatan Jumlah Investor PMDN/PMA	-	-	128%	286 %	-	Berhasil

3.2.2 Capaian Kinerja Eselon III

a. Sekretris

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			ket
				2018	2019	2020	
1.	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	100 %	100%	100%	100%	100%	Berhasil
	1. Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	100 %	100%	100%	100%	100%	Berhasil
	2. Cakupan ketersediaan Sarana dan prasarana	100 %	100%	100%	100%	100%	Berhasil

		3. perkantoran Cakupan Pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin	100 %	100%	100%	100%	100%	Berhasil
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta akuntabilitas keuangan	2. Cakupan temuan internal dan eksternal - Porsentase ketepatan penempatan antara program, kegiatan dan anggaran, Nilai LKIP oleh Inspektorat Kota Bima	100%	100%	100%	100%	100%	Berhasil

b.. Kepala Bidang Penanaman modal

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			Ket
				2018	2019	2021	
1	2	3		2018	2019	2021	
1. Meningkatkan investasi Menengah ke atas PMDN/PMA yang memiliki izin	Porsentase peningkatan Investasi Menengah ke atas yang berizin	100%	100%	100%	100%	100%	Berhasil
2. Meningkatkan Realisasi Usaha yang berizin	Porsentase usaha berizin dengan volume usaha meningkat	100%	110%	100%	100%	110%	Berhasil

c. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)			KET
				2018	2019	2021	
1	2	3	4	5		6	
Meningkatnya Efektifitas pelayanan perizinan	Rata-rata Lama Proses penyelesaian Pelayanan perizinan	1 Hari	1 Hari	100	100	100	Berhasil

d. Kepala Bidang Informasi pengaduan dan Pengembangan Pelayanan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)			KET
				2018	2019	2020	
1	2	3	4	5		6	
Meningkatnya Kualitas pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan	Rata-rata Lama Proses Pemenuhan Komitmen terkait Izin usaha dan Izin Operasional/Komersi I PBTSE	3 Hari	3 Hari	100	100	100	Berhasil

3.2.3. Capaian Kinerja Eselon IV

a. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)			KET
				2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6		

Terlaksananya pelayanan administrasi jasa perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kepegawaian	1. Jumlah Surat menyurat perkantoran yang diterima dan terdistribusi	550 lembar	550 lembar	100	100	100	Berhasil
	2. Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	5 Jasa pelayanan	5 jasa pelayanan	100	100	100	Berhasil
	3. Jumlah ketersediaan peralatan perkantoran	22 Bh/Unit	22 Bh/Unit	100	100	100	Berhasil
	4. Jumlah ketersediaan perlengkapan perkantoran	2 Bh/Unit	2 Bh/Unit	100	100	100	Berhasil
	5. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	30 Bh/Unit	30 Bh/Unit	100	100	100	Berhasil
	6. Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	9 Dok	9 Dok	100	100	100	Berhasil
	7. Ketepatan waktu penyelesaian rekonsiliasi BMD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	100	100	Berhasil
	8. Jumlah dokumen kepegawaian yang tersedia	12 dok	12 dok	100	100	100	Berhasil
	9. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis PTSP	6 Orang	6 Orang	100	100	100	Berhasil
	10. Jumlah tamu yang terlayani dengan makan minum	250 Orang	250 Orang	100	100	100	Berhasil

b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)			KET
				2018	2019	2020	
1	2	3	4	5			6
Terlaksananya peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta akuntabilitas keuangan	1. Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	5 Dok	5 Dok	100	100	100	Berhasil
	2. Jumlah Laporan Perencanaan	3 Laporan	3 Laporan	100	100	100	Berhasil
	3. Jumlah Laporan Keuangan	3 laporan	3 Laporan	100	100	100	Berhasil
	4. Jumlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Laporan Penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah	2 Laporan	2 Laporan	100	100	100	Berhasil
	5. Jumlah dokumen kebijakan internal yang diterbitkan	4 Dok	4 Dok	100	100	100	Berhasil
	6. Posentase keselarasan program, kegiatan dan anggaran internal	75 %	90%	100	120	100	Berhasil
	7. Porsentase program, kegiatan dan anggaran yang terakumodir sesuai dengan kebutuhan DMPTSP pertahun	85%	90%	100	105	100	Berhasil



	8. Presentase kepuasan Pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan	95 %	95%	100	100	100	Berhasil
--	---	------	-----	-----	-----	-----	----------

c. Kepala Seksi Potensi dan promosi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN %			KET
				2018	2019	2020	
1	2	3	4	5			6
Terlaksananya dokumen perda dan perwali	Dokumen rancangan perda dan perwali	2 Dok	2 dok	100	100	100	Berhasil
Terlaksananya Penyebarluasan informasi potensi dan peluang usaha	Jumlah publikasi informasi Investasi yang dilakukan	4 Kali	4 kali	100	100	100	Berhasil

d. Kepala Seksi Kerjasama

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			KET
				2018	2019	2020	
1	2	3	4	5			6
Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal	Jumlah Dokumen LKPM dan berita Acara (Buku panduan LKPM)	50 Perusahaan	55 perusahaan	100	150	110	Berhasil
terlaksananya kerjasama investasi	Jumlah kerjasama investasi yang disepakati	3 MOU	2 MOU	100	100	67%	Tinggi

e. Kepala Seksi Perizinan Non Usaha

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)			KET
				2018	2019	2020	
1	2	3	4	5			6
terlaksananya jumlah verifikasi lapangan	Jumlah permohonan izin yang diverifikasi	1500 Izin Usaha /Non usaha	835	100	100	56 %	Tinggi

f. Kepala Seksi Perizinan Usaha

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)			KET
				2018	2019	2020	
1	2	3	4	5			6
Tersedianya Standar pelayanan terhadap setiap izin usaha/Non usaha yang diterbitkan	Jumlah Standar Pelayanan terhadap jenis izin yang diterbitkan	97 Dokumen	97 Dokumen	125%	100%	100%	Berhasil
Terlaksananya pemberian pelayanan perizinan usaha / non usaha	Jumlah Izin usaha dan non usaha yang diterbitkan	2500 izin usaha/non usaha	2218 izin usaha/non usaha	100%	100%	89 %	Berhasil

g. Kasi Layanan Informasi dan Pengaduan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)			KET
				2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6		
Terpenuhinya Dokumen Pedoman dan Tata cara pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin usaha dan Izin Operasional/Komersil PBTE	Pedoman Komitmen yang tersusun	24 pedoman pemenuhan komitmen	24 pedoman pemenuhan komitmen	100	100	100	Berhasil
Terpenuhi tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat mengenai pelayanan perizinan	jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %	100%	100	100	100	Berhasil
Terlaksananya survey IKM	Jumlah laporan IKM	2 Dokumen	2 Dok	100	100	100	Berhasil

h. Kasi Kebijakan dan Inovasi pelayanan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)			KET
				2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6		
Terlaksananya Sosialisasi Perizinan yang terintegrasi Secara Elektronik (Online)	Jumlah Izin Yang terintegrasi secara Elektronik (Online)	97 Jenis izin usaha dari 13 sektor perijinan	97 Jenis izin usaha dari 13 sektor perijinan	100	100	100	Berhasil
tersedianya Dokumen Realisasi Investasi tiap tahun	Dokumen Realisasi Investasi	1 Dok	1 Dok	100	100	100	Berhasil

3.3 AKUNTABILITAS ANGGARAN

Selama Tahun Anggaran 2020, kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dibiayai dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.366.663.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.344.654.210 atau 98,39 %.

Adapun realisasi Belanja Langsung tahun 2020 sebagai berikut :



Tabel. 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		426.787.800,00	416.725.710,00	10.062.090,00	97,64
1	Penyediaan jasa surat menyurat	60.900.000,00	58.725.000,00	2.175.000,00	96,43
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	50.640.000,00	44.001.131,00	6.638.869,00	86,89
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.500.000,00	4.903.805,00	596.195,00	89,16
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	56.464.000,00	56.464.000,00	0,00	100,00
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00
6	Penyediaan alat tulis kantor	20.723.000,00	20.723.000,00	0,00	100,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.830.000,00	31.830.000,00	0,00	100,00
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.961.500,00	8.961.500,00	0,00	100,00
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	29.880.000,00	29.280.000,00	600.000,00	97,99
10	Penyediaan makanan dan minuman	3.608.300,00	3.600.000,00	8.300,00	99,77
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	136.681.000,00	136.637.274,00	43.726,00	99,97
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		219.389.800,00	215.143.000,00	4.246.800,00	98,06
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	24.305.000,00	24.305.000,00	0,00	100,00
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	100,00
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.234.800,00	25.213.000,00	21.800,00	99,91



5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	100,00
7	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	150.000.000,00	145.775.000,00	4.225.000,00	97,18
c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		125.623.000,00	125.263.000,00	360.000,00	99,71
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan semesteran	14.272.000,00	14.272.000,00	0,00	100,00
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan Prognosis	7.748.000,00	7.748.000,00	0,00	100,00
3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	13.908.000,00	13.908.000,00	0,00	100,00
4	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA-DPA/PRKA-DPPA	52.526.500,00	52.166.500,00	360.000,00	99,31
5	Penyusunan LAKIP dan LPPD	37.168.500,00	37.168.500,00	0,00	100,00
d. Program Peningkatan Realisasi dan Kerjasama Investasi		93.652.300,00	92.327.300,00	1.325.000,00	98,59
1	Pengendalian Palaksanaan Penanaman Modal	59.982.650,00	58.658.300,00	1.324.350,00	97,79
2	Peningkatan Kerjasama Investasi	33.669.650,00	33.669.000,00	650,00	100,00
e. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Promosi		107.237.700,00	107.237.700,00	0,00	100,00
1	Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	65.317.700,00	65.317.700,00	0,00	100,00
2	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	41.920.000,00	41.920.000,00	0,00	100,00
f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan		198.092.500,00	196.557.500,00	1.535.000,00	99,23

1	Penyusunan Pedoman dan Tatacara Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Operasional / komersil PBTSE	30.293.500,00	30.293.500,00	0,00	100,00
2	Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	43.366.500,00	43.331.500,00	35.000,00	99,92
3	Survey Kepuasan Masyarakat	61.740.000,00	60.240.000,00	1.500.000,00	97,57
4	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	31.972.500,00	31.972.500,00	0,00	100,00
5	Penyusunan Dokumen Realisasi Investasi	30.720.000,00	30.720.000,00	0,00	100,00
g. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan		195.880.000,00	191.400.000,00	4.480.000,00	97,71
1	Peningkatan Standar Pelayanan Perizinana dan Non Perizinan	16.125.000,00	16.125.000,00	0,00	100,00
2	Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu	142.275.000,00	138.545.000,00	3.730.000,00	97,38
3	Melakukan Verifikasi Lapangan	37.480.000,00	36.730.000,00	750.000,00	98,00
	Total	1.366.663.100,00	1.344.654.210,00	22.008.890,00	98,39

Dari tabel diatas sebagai mana tertera di atas dapat dijelaskan anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi atau program prioritas DPMP TSP adalah sebesar Rp. 594.862.500,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Realisasi dan Kerjasama Investasi dengan total anggaran sebesar Rp. 93.652.300,00, dengan Pengendalian Palaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp. 59.982.650,00, dan Peningkatan Kerjasama Investasi sebesar Rp. 33.669.650,00
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Promosi dengan total anggaran sebesar Rp. 107.237.700,00, dengan Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan sebesar Rp. 65.317.700,00, Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah sebesar Rp. 41.920.000,00.



- c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan dengan total anggaran sebesar Rp 198.092.500,00, dengan kegiatan sebagai berikut :
- Penyusunan Pedoman dan Tatacara Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Operasional / komersil PBTSE sebesar Rp. 30.293.500,00
 - Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Sebesar Rp. 43.366.500,00
 - Survey Kepuasan Masyarakat sebesar Rp. 61.740.000,00
 - Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sebesar Rp. 31.972.500,00
 - Penyusunan Dokumen Realisasi Investasi sebesar Rp. 30.720.000,00
- d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dengan total anggaran sebesar Rp. 195.880.000,00, dengan kegiatan sebagai berikut :
- Peningkatan Standar Pelayanan Perizinana dan Non Perizinan sebesar Rp. 16.125.000,00
 - Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu Sebesar Rp. 142.275.000,00
 - Melakukan Verifikasi Lapangan sebesar Rp. 37.480.000,00



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima. Media ini juga dapat dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Dari Hasil pembahasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima, maka di ambil Kesimpulan dan Saran sebagai berikut :

1. **KESIMPULAN**

Secara garis besar, pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

- a. Dari dua Sasaran Strategis dan Dua Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Yaitu :
 1. Indikator Kinerja Utama “ Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dengan Indikator utama yakni IKM (Indeks Kepuasan Pelayanan) : Pada tahun 2020 Mengalami peningkatan Skor IKM Sebesar 90,32 (A)
 2. Indikator kinerja Utama “ Meningkatnya Nilai Investasi dengan Dua Indikator sebagai berikut :
 - Porsentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA: pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 32 % atau dengan capaian 318 %
- b. Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan tersebut berjalan efektif adalah :
 1. Tersedianya anggaran yang cukup;
 2. Adanya Kemitraan dan koordinasi dengan Dinas/badan teknis terkait;
 3. Tersedianya Sumber Daya Pegawai yang cukup memadai;
 4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung.
- c. Melihat konsistensi pencapaian kinerja tahun 2020 dengan dokumen RENSTRA Perubahan atas Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima tahun 2018 - 2023, maka dapat disimpulkan bahwa sudah terdapat kaitan logis mulai dari kegiatan sampai ke pencapaian visi.



- d. Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima sampai dengan 31 Desember 2020, dibiayai dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.366.663.100- dengan realisasi sebesar Rp. 1.344.654.210 atau 98,39 %.

2. SARAN

- a. Salah satu cara Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan untuk lebih mempercepat akselerasi pembangunan di Kota Bima , antara lain adalah
1. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pelayanan publik;
 2. Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dalam proses pelayanan perijinan;
 3. Mempertahankan dan lebih meningkatkan koordinasi dan keterpaduan antar bidang dalam rangka peningkatan kinerja;
 4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam kualitas pelayanan perijinan di daerah Kota Bima;
 5. Mendorong dan lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan melalui berbagai sosialisasi dan memberikan sosialisasi mengenai perizinan online melalui OSS.
- b. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dikemudian hari.

Kota Bima, Februari 2021
Plt. Kepala Dinas

Drs. A DISAN
Pembina (IV/a)
Nip. 196507292005011004